**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Literatur Review**

Penelitian yang menganalisis dukungan Indonesia-China telah dilakukan oleh para penguji, tokoh, dan mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Maka penulis memanfaatkan buku-buku, jurnal, laporan penelitian, laporan saran dan penilaian sebagai sumber referensi dan informasi, antara lain melalui:

Artikel utamanya adalah jurnal berjudul “Kebijakan Poros Martim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya” yang ditulis oleh Poltak Partogi Nainggolan (Partogi dkk., 2015).

Penulis ini menjelaskan bahwa kebijakan Indonesia dalam membuat Indonesia sebagai poros maritim dunia telah mendapatkan sejumlah reaksi yang beragam dari seluruh dunia. Penulis ini menyoroti bagaimana reaksi negara di Asia Tenggara dan China sebagai inti dari tulisan ini, dimana dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh presiden Joko Widodo pada tahun 2014 dimana Ia menginginkan bahwa Indonesia harus menjadi pusat maritim di dunia. Kebijakan ini sendiri merupakan sebuah pembangunan jalur tol laut dimana nantinya akan menjadi tempat lalu lalang perdagangan maritim dunia. Oleh karena itu, penulis ini mengemukakan bahwa pentingnya infrastruktur laut menjadi utama dalam kebijakan ini, dan respon dari banyak negara seperti China, Amerika Serikat, Jepang, hingga Korea Selatan ingin melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur laut seperti pelabuhan.

Kebijakan ini juga mendapat banyak reaksi penolakan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti dimana ia melakukan penenggelaman kapal yang melakukan kegiatan *ilegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kapal-kapal tersebut merupakan kapal yang dimiliki oleh warga negara dari Asia Tenggara dan China dengan adanya penegakan hukum yang dilakukan sebagai langkah awal realisasi kebijakan poros maritim dunia. Respon dari China digambarkan seakan memaksa Indonesia dalam melepas mereka dari kebijakan pemberantasan *ilegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dengan mengatakan bahwa mereka telah memberikan investasi yang besar kepada negara Indonesia bahkan mengancam untuk mengurangi nilai investasi dari kerjasama Indonesia-China.

Tulisan kedua yaitu berupa jurnal yang berjudul “Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (OBOR) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim” yang ditulis oleh Santi Wira Wibawati, Marina Ika Sari, dan Yuli Ari Sulistiyani (Wira Wibawati dkk., t.t.). Penulis ini menjelaskan mengenai potensi dan tantangan bagi Indonesia dalam bergabung ke mega proyek yang diinisiasi oleh China.

Penulis menjabarkan dalam jurnal tersebut mengenai permasalahan apa yang Indonesia miliki sebelum bergabung dengan OBOR seperti banyaknya *ilegal fishing* yang terjadi selama ini dalam hal tersebut sudah banyak mengganggu perekonomian Indonesia bahkan mengancam ketersediaan ikan dalam negeri. Penulis juga menjelaskan beberapa hal yang bisa dicapai dalam bergabungnya dengan OBOR ini, Indonesia mampu meningkatkan ekonomi nya dengan mudahnya akses ekspor dan mampu menerima impor dengan mudah dikarenakan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dimana akan dilewati oleh jalur OBOR ini ialah selat malaka, dan berbagai tempat lainnya.

Bukan hanya mampu meningkatkan perekonomian dalam negeri dengan mudahnya akses penjualan melalui laut namun visi yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo dapat terlaksana secara bersamaan dengan adanya pembangunan infrastrukur laut maka akses melakukan penjualan melalui laut akan lebih mudah lagi. Namun, bukan hanya potensi saja yang penulis katakan dalam jurnal tersebut bagi Indonesia lebih banyak tantangan yang harus dilalui dalam bergabungnya Indonesia dengan OBOR demi mewujudkan Poros Maritim Dunia dimana dengan bergabungnya Indonesia dengan OBOR maka keamanan laut dalam negeri harus ditingkatkan lagi secara signifikan.

Hal tersebut harus dilaksanakan dikarenakan bukan semata meningkatkan kekuatan dalam negeri namun demi keamanan kapal-kapal asing yang akan melewati Indonesia dalam OBOR. Selain harus ditingkatkannya keamanan laut Indonesia ada juga tantangan dimana Indonesia tidak mampu menjual barangnya dikarenakan kurangnya kualitas di pasar. Indonesia dinilai belum mampu menandingi barang buatan China ataupun India maupun negara lain dimana itu sangat berpengaruh demi menjadikan Indonesia sebagai salah satu pilar yang mampu menjalankan proyek OBOR ini.

Tulisan ketiga yaitu sebuah buku yang berjudul “Maritime Security and Indonesia: Cooperation. Interests and Strategies” yang ditulis oleh Senia Febrica(Moudgil, 2017). Penulis menjelaskan dalam karya bukunya bahwa Indonesia merupakan negara dengan kesibukan jalur laut yang sangat tinggi dimana hampir setengah dari penjualan yang melalui laut di seluruh dunia melalui Indonesia dari poin tersebut penulis berusaha menjelaskan bagaimana Indonesia melakukan penjagaan keamanan maritim dalam perdagangan global dimana Indonesia memiliki peran yang sangat penting dengan maraknya pembajakan kapal bahkan tindakan terorisme yang dilaksanakan di laut. Hal tersebut menjadikan kebijakan maritim Indonesia menjadi sangat vital dalam mempertahankan kepercayaan global dalam memutuskan untuk mengirim barang melalui Indonesia.

Penulis menerangkan dalam bukunya bahwa peran Indonesia sangat penting dalam konteks usaha keamanan maritim regional. Penulis mengatakan untuk memfokuskan kepada Indonesia dalam meningkatkan kekuatan dalam kerjasama. Dalam buku tersebut penulis menggunakan kacamata neorealis dan neoliberal dalam menganalisa bagaimana pemerintahan Indonesia dalam mengambil keputusan dalam bidang maritim di Indonesia. Bukan hanya menjelaskan mengenai kebijakan maritim di Indonesia namun penulis juga menjelaskan bagaimana kondisi politik dalam negeri dan luar negeri dengan menggunakan pendekatan politik birokrasi dan membandingkan kebijakan maritim Indonesia dari zaman orde lama sampai zaman reformasi.

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul Buku/Skripsi/Jurnal** | **Penulis**  | **Persamaan**  | **Perbedaan**  |
| **1** | Kebijakan Poros Martim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya | Poltak Partogi Nainggolan | Membahas mengenai Kebijakan Poros Maritim Dunia presiden Joko Widodo | Membahas mengenai bagian pembangunan dalam Kebijakan Poros Maritim Dunia presiden Joko Widodo |
| **2** | Potensi Dan Tantangan One Belt One Road (OBOR) Bagi Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Maritim | Santi Wira Wibawati,Marina Ika Sari,Yuli Ari Sulistiyani | Menjelaskan bagaimana Visi Presiden Joko Widodo dapat berkembang dalam OBOR | Menjelaskan bagaimana Indonesia berperan dalam kerjasama OBOR sesuai dengan Visi Presiden Joko Widodo |
| **3** | Maritime Security and Indoensia: Cooperation. Interests and Strategies.  | Senia Febrica | Menjelaskan kebijakan dalam negeri dan luar negeri Indonesia dalam bidang maritim  | Menjelaskan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan pembangunan maritim |

**2.2 Kerangka Teoritis**

Sistem hipotetis adalah struktur dan spekulasi yang digunakan pencipta untuk membantu mengarahkan eksplorasi dan selanjutnya sebagai tolok ukur dan pemeriksaan terhadap permasalahan dalam penelitian.

**2.2.1 Hubungan Internasional**

Seperti yang ditunjukkan oleh Trevor Taylor, hubungan global adalah disiplin logis yang memahami praktik politik lintas sektor publik. Berkaitan dengan hubungan politik antara pemerintah, perwakilan resmi negara. Hubungan politik ini dianggap unik sehingga membentuk cabang ilmu politik yang terpisah, karena dilakukan dalam ‘sistem politik’, dalam masyarakat dimana tidak ada otoritas pusat yang absolut(Taylor 1978).

Untuk sementara, menurut K.J. Holsti, hubungan internasional dapat mengkhawatirkan semua jenis hubungan antara jaringan dengan legislatif dan penduduk. Kajian hubungan global sendiri dikenang karena kajian terhadap persoalan-persoalan pemerintahan yang asing atau bersifat global, mencakup seluruh aspek persekongkolan yang terjadi di berbagai negara di muka bumi.(K.J. Holsti 1987).

Terbentuknya sebuah orientasi serta sikap dari para aktor dalam respon serta dapat memprediksi preferensi yang diambil oleh aktor dapat menimbulkan sebuah kerjasama. Seperti yang dilakukan oleh Indonesia dengan China dalam membangun kerjasama yang tercakup dalam BRI yang digagas oleh China pada tahun 2013 Indonesia dengan China melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, infrastruktur dan keamanan maritim. Dimana negara China melakukan investasi secara besar-besaran terhadap pembangunan infrastruktur laut yang ada di Indonesia. Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan perekonomian Indonesia dalam bidang maritim serta mewujudkan cita-cita Indonesia dalam menciptakan poros maritim dunia yang sudah digagas oleh presiden Joko Widodo.

**2.2.2 Teori Hubungan Bilateral**

Kolaborasi timbal balik adalah partisipasi yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan kedua negara dan untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan masing-masing bergantung pada hubungan politik dan sosial antara dua negara (Steven L. Lamy dkk., 2020).

Menurut Didi Krisna dalam bukunya yang berjudul kamus politik internasionalnya menyatakan bahwa “Hubungan bilateral sendiri merupakan keadaan yang mendeskripsikan adanya suatu interaksi yang saling mensugesti serta dapat terjadi bila adanya interaksi timbal balik antara kedua pihak atau dua negara” (Didi Krisna 1993).

Relasi bilateral dapat terjalin tidak hanya dengan negara yang letaknya berdekatan namun dengan negara yang letaknya sangat jauh. Dengan adanya tujuan dalam setiap negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya maka suatu kerjasama harus memperhatikan kerjasama dalam bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Serta dapat membentuk sebuah interaksi yang selaras dengan dan membuat sejahtera kepada kedua negara.

Seperti halnya yang dilakukan Indonesia dengan China dalam melakukan kerjasama dalam BRI dimana Indonesia dan China yang berafiliasi dalam bidang infrastruktur, ekonomi, dan maritim yang bertujuan memenuhi kepentingannya masing-masing sehingga dengan adanya kerjasama tersebut interaksi antara kedua negara berlangsung baik dengan terpenuhinya kebutuhan nasional atau kepentingan yang disepakati.

**2.2.3 Kebijakan Luar Negeri China**

Kebijakan luar negeri memiliki artian sebagai sebuah acuan yang berdasarkan kebijakan dari sebuah negara yang digunakan dalam mengatur hubungan luar negeri dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan nasional dari negara tersebut.

Menurut Valerie M. Hudson mengatakan bahwa politik luar negeri ialah sebuah sub disiplin dari hubungan internasional untuk menjadi panduan dalam menjalin hubungan persahabatan atau permusuhan kepada negara tersebut (Hudson, 2005).

Pada era pemerintahan Xi JinPing, ia menerapkan kebijakan luar negeri *Chinese Dream* dalam kebijakan yang dibuat yaitu BRI. Konsep dari *Chinese Dream* sendiri yaitu sebagai kebangkitan nasional yang menargetkan China agar bisa menjadi negara komunis yang kuat.

Dengan adanya kebijakan luar negeri tersebut dapat membantu negara China untuk dapat memajukan kepentingan nasionalnya terutama dalam bidang ekonomi juga dapat memajukan proyek pembangunan dalam investasi di bidang infrastruktur.

**2.2.4 Kepentingan Nasional Indonesia**

Hipotesis kepentingan publik direncanakan sebagai alasan untuk menentukan pemimpin dari rincian strategi internasional, khususnya keuntungan publik mereka. Hipotesa kepentingan umum ini merupakan suatu struktur atau tujuan yang harus dicapai dan dihubungkan dengan kebutuhan suatu bangsa atau negara yang sebanding dengan hal ideal yang ingin dicapai.

Seperti yang ditunjukkan oleh Jack C. Plano dan Beam Olton mereka mengatakan bahwa “sehubungan dengan kepentingan publik, lebih spesifiknya sebagai kebutuhan dan keinginan negara berdaulat lain yang merupakan iklim luarnya.””(Plano & Olton, 1999).

Indonesia dalam kerangka Belt Road Initiative ini dihadapkan dengan kepentingan nasional Indonesia dengan adanya kebijakan Poros Maritim Dunia dengan harapan Indonesia dapat menjadi pusat perdagangan dan keamanan maritim di dunia.

**2.2.5 Foreign Direct Investment**

Dalam membangun perekonomian sebuah negara dibutuhkan sumber modal dan modal tambahan, dalam bentuk investasi maupun tabungan.

Investasi asing dapat memberikan keuntungan kepada sebuah negara dalam membangun dan memajukan industrialisasi ekonomi. Investor asing dapat meningkatkan efisiensi operasional sektor dan dalam beberapa kasus, membangun infrastruktur untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi negara yang memiliki hubungan kerjasama atau mitra.

Menurut Paul Sumeslon dan Nordhaus yang ditulis dalam buku *ekonomi makronya*, yaitu penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang berupa dana ataupun jasa merupakan wujud dari definisi investasi asing, seperti pinjaman dana ataupun transportasi. (Samuelson & Nordhaus, 1989).

Pada triwulan pertama dalam 2016, China menjadi salah satu investor terbesar karena realisasi dalam penginvestasian mencapai nilai kurang lebih US$ 464 Juta yang tertuang dalam data BKPM. (Ji 2015).

Peningkatan investasi ini dapat dikaitkan dengan adanya mega proyek yang dilakukan oleh China dengan menggaet Indonesia dalam mega proyek tersebut dimana Indonesia masih memiliki kepentingan nasionalnya sendiri dengan membutuhkan modal yang tergolong besar.

**2.2.6 Teori Pembangunan Maritim**

Secara umum, pembangunan itu sendiri dapat dipahami sebagai suatu perencanaan yang dilakukan oleh badan perencanaan dan pembangunan untuk membentuk sebuah perbedaan yang digunakan sebagai proses untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Siagian (1994), perbaikan dicirikan sebagai suatu karya atau rangkaian upaya pembangunan dan perubahan yang disusun dan diselesaikan dengan sengaja oleh suatu negara, negara bagian, pemerintah, menuju inovasi dalam rangka pembangunan negara.Siagian, 1994).

Pembangunan maritim dapat diartikan sebagai sebuah usaha peningkatan secara berencana dan dilakukan secara rasional oleh suatu bangsa demi meningkatkan infrastruktur maritim seperti pelabuhan, peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi laut, penangkapan ikan, dan turis.

Pembangunan maritim di Indonesia berfokus kepada infrastruktur laut di mana ada 14 pembangunan infrastruktur yang sedang di inisiasi oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan BUMN maupun Swasta di 14 titik di Indonesia(Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia 2018).

**2.3 Hipotesis Penelitian**

**Kerjasama Indonesia-China dalam Belt Road Initiative Dapat Meningkatkan Pembangunan Dalam Bidang Maritim Dengan Melakukan Investasi Dalam Pembangunan Pelabuhan Dan Kapal**

**2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator**

**Tabel 2. 1**

 **Tabel Indikator Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam hipotesis (teoritik) | Indikator(empirik) | Verifikasi (analisis) |
| Variabel bebas: Jika kerjasama Indonesia China (Belt Road Initiative) Terpenuhi  | 1. Kebijakan Poros Maritim Dunia2. investasi infrastruktur dari China  | 1. Kebijakan Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan meningkatkan konektivitas dan keterjangkauan antar pulau di Indonesia. Kebijakan yang dibuat adalah sebagai wujud untuk mempromosikan peran dari ekonomi kemaritiman yang bersinergi dan juga untuk pembangunan.*Sumber : Jurnal Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Strategi Ekonomi dan Keamanan Laut Indonesia M. Najeri Al Syahrin*2. Minat yang sangat tinggi dari negara China dalam melakukan investasi di Indonesia. |
| Variabel Terikat: Maka Pembangunan Maritim Indonesia Akan Mengalami Peningkatan  | 1. Pembangunan Infrastruktur Maritim  | 1. Pembangunan infrastruktur pelabuhan dengan jumlah 24 pelabuhan sebagai simpul jalur tol laut dengan 5 pelabuhan utama. Pembangunan kapal dengan tujuan demi mendukung tol laut. *Sumber : Jurnal Pembangunan Infrastruktur Maritim Untuk Mendukung Program Tol Laut Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia (PMD). Karya Mithun Sinaga, D. A. Mamahit, Yusnaldi.* |

**2.5 Skema Kerangka dan Alur Penelitian**

Peningkatan Pembangunan Maritim

Indonesia

China

Belt Road Initiative

Investasi